



Pelaksanaan Pendampingan Pengelolaan Keuangan pada Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Riau: Studi Pengalaman Kuliah Kerja Lapangan

Nur Khaidah¹, Andi Auliya Ramadhany²

¹ Universitas Ibnu Sina (UIS), Batam, Indonesia

² Universitas Ibnu Sina (UIS), Batam, Indonesia

Email : 231062201016@uis.ac.id¹; andi.auliya@uis.ac.id²

Abstrak

Kuliah Kerja Lapangan (KKL) merupakan program akademik yang dirancang guna membekali mahasiswa dengan pengalaman kerja autentik, sekaligus menjembatani kesenjangan antara pengetahuan teoritis yang diperoleh di bangku perkuliahan dengan tuntutan praktis di lingkungan profesi. Program ini diselenggarakan di Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, dengan penempatan pada unit Sekretariat yang membidangi administrasi keuangan. Dalam rentang waktu pelaksanaan KKL, sejumlah kegiatan substantif telah diikuti oleh mahasiswa, mencakup penyusunan Revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) III Tahun Anggaran 2026, penggarapan Rencana Penarikan Dana (RPD), kompilasi dokumen pertanggungjawaban keuangan, penyusunan laporan realisasi anggaran periode bulanan, pemrosesan data keuangan berbasis Google Sheets, serta inventarisasi kebutuhan konsumsi dan perlengkapan operasional kantor. Keterlibatan dalam rangkaian aktivitas tersebut memberikan wawasan komprehensif mengenai mekanisme administrasi dan tata kelola keuangan yang berlaku pada instansi pemerintah. Secara keseluruhan, pelaksanaan KKL telah memberikan kontribusi nyata dalam penguatan kapasitas mahasiswa, baik pada dimensi keterampilan pengolahan data, penyusunan dokumen keuangan, ketelitian kerja, tanggung jawab profesional, maupun pemanfaatan teknologi informasi sebagai instrumen penunjang kegiatan administrasi dan pelaporan keuangan. Dengan demikian, KKL terbukti menjadi wahana pembelajaran yang efektif dalam meningkatkan kompetensi akademik dan kesiapan profesional mahasiswa untuk memasuki dunia kerja.

Kata kunci: Kuliah Kerja Lapangan, Pengelolaan Keuangan, Ombudsman Republik Indonesia, Pertanggungjawaban Keuangan, Laporan Realisasi Anggaran.

Abstract

The Field Work Practice (Kuliah Kerja Lapangan/KKL) constitutes an academic program designed to furnish students with authentic professional exposure while bridging the gap between theoretical knowledge acquired in formal education and the practical demands of the workplace. This program was conducted at the Representative Office of the Ombudsman of the Republic of Indonesia in the Riau Islands Province, specifically within the Secretariat Division responsible for financial administration. Throughout the duration of the program, students engaged in a series of substantive activities, including the preparation of the Revision III Operational Activity Guidelines (POK) for Fiscal Year 2026, the formulation of the Fund Withdrawal Plan (RPD), the compilation of financial accountability documents, the preparation of monthly budget realization reports, financial data

processing using Google Sheets, and the recording of office operational supply requirements. Participation in these activities yielded comprehensive insight into the administrative procedures and financial governance practices applicable to government institutions. The Field Work Practice demonstrably strengthened students' professional capacities across multiple dimensions, encompassing data processing skills, financial documentation proficiency, precision, professional accountability, and the utilization of information technology to support administrative and financial reporting functions. Consequently, the program served as an effective learning platform for advancing both academic competence and professional readiness.

Keywords: *Field Work Practice, Financial Management, Ombudsman of the Republic of Indonesia, Financial Accountability, Budget Realization Report.*

PENDAHULUAN

Kuliah Kerja Lapangan (KKL) merupakan program yang mempertemukan mahasiswa dengan dunia kerja nyata. Berbeda dari perkuliahan yang bersifat teoritis, KKL memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk terlibat langsung dalam pekerjaan profesional sehingga dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, keterampilan teknis, dan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana teori benar-benar diaplikasikan dalam situasi kerja. Sejalan dengan hal tersebut, penerapan experiential learning dalam pendidikan akuntansi efektif dalam mengurangi jarak antara teori dan kebutuhan kompetensi di lapangan (Monika dan Kristanto, 2024)

Bagi mahasiswa akuntansi, KKL menjadi cara terbaik untuk memahami bagaimana pengelolaan keuangan sektor publik dijalankan. Dalam praktiknya, pengelolaan keuangan pemerintah tidak hanya tentang membuat laporan keuangan—ia mencakup proses yang lebih panjang, mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan kegiatan, penatausahaan, pertanggungjawaban, hingga pelaporan. Seluruh proses itu harus dilaksanakan dengan mengedepankan akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan efisiensi sebagai bagian dari penerapan good governance (Ema dan Santoso, 2024).

Dari sisi hukum, pengelolaan keuangan negara diatur dalam dua undang-undang utama. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur bahwa pengelolaan keuangan harus dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab (Undang-Undang Republik Indonesia, 2003). Sementara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mewajibkan setiap instansi untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran secara administratif maupun substantif (Undang-Undang, 2004). Kedua regulasi tersebut menjadikan akuntabilitas sebagai kewajiban yang tidak bisa diabaikan oleh instansi pemerintah manapun.

Selama menjalani KKL di Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, penulis ditempatkan di Bagian Sekretariat dan terlibat dalam berbagai kegiatan administrasi keuangan. Kegiatan itu meliputi penyusunan Revisi POK III, RPD, SPJ, LRA bulanan, pengolahan data keuangan, serta pendataan kebutuhan operasional kantor. Meskipun konsep-konsep tersebut sudah dikenal dari perkuliahan, praktik di lapangan ternyata memiliki banyak detail yang tidak tercover dalam pembelajaran di kelas—dan perbedaan itulah yang mendorong penulisan artikel ini.

METODE

2.1 Jenis Kegiatan

Artikel ini disusun berlandaskan pengalaman penulis selama mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Lapangan di Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kepulauan Riau. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan experiential learning, yaitu

menggambarkan secara naratif pengalaman mahasiswa dalam kegiatan administrasi keuangan pemerintah serta membandingkannya dengan konsep yang telah diperoleh selama perkuliahan.

2.2 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan

Kegiatan KKL diselenggarakan di Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kepulauan Riau yang berlokasi di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, selama periode tiga bulan, yakni 15 April 2026 hingga 15 Juli 2026. Selama pelaksanaan, penulis ditempatkan pada Bagian Sekretariat dengan fokus pada bidang pengelolaan keuangan instansi.

2.3 Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui empat teknik utama. Pertama, observasi langsung terhadap alur kerja administrasi keuangan di Bagian Sekretariat. Kedua, partisipasi aktif dalam kegiatan penyusunan dokumen anggaran, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan. Ketiga, pengumpulan dokumentasi berupa arsip dan formulir keuangan yang digunakan selama KKL. Keempat, studi literatur melalui penelaahan buku, jurnal ilmiah, dan regulasi yang relevan dengan akuntansi sektor publik dan pengelolaan keuangan pemerintah.

2.4 Tahap Pelaksanaan Pendampingan

Pelaksanaan pendampingan pengelolaan keuangan selama KKL dilaksanakan melalui beberapa tahapan sebagaimana pada gambar 1 dibawah ini:



Gambar 1. Tahapan pendampingan pengelolaan keuangan pada Perwakilan Ombudsman Kepulauan Riau

2.5 Teknik Analisis

Data yang dihimpun selama kegiatan KKL dianalisis secara deskriptif dengan cara membandingkan konsep pengelolaan keuangan yang dipelajari di perkuliahan dengan praktik nyata di lapangan. Proses analisis dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan hasil observasi, dokumentasi, serta pengalaman partisipasi langsung. Hasil analisis disajikan dalam bentuk uraian naratif yang menggambarkan proses pendampingan secara menyeluruh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Kegiatan KKL

Kuliah Kerja Lapangan (KKL) dilaksanakan di Bagian Sekretariat Perwakilan Ombudsman RI Kepulauan Riau, tepatnya pada bidang pengelolaan keuangan. Selama kegiatan berlangsung, penulis terlibat secara langsung dalam berbagai aktivitas administrasi keuangan yang mendukung kelancaran pengelolaan anggaran instansi.

Kegiatan pendampingan tidak hanya berfokus pada penyusunan dokumen keuangan, tetapi juga mencakup proses administrasi sebelum dan sesudah dokumen tersebut disusun. Seluruh kegiatan dilakukan di bawah arahan pegawai pengelola keuangan sehingga setiap

tahapan dapat dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Seluruh kegiatan pendampingan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan alur administrasi pengelolaan keuangan pada Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kepulauan Riau.

Ringkasan kegiatan yang dilakukan selama KKL disajikan pada Tabel 1:

.Tabel 1. Kegiatan Pendampingan Pengelolaan Keuangan

NO	KEGIATAN	OUTPUT
1	Membantu penyusunan Revisi POK III tahun anggaran 2026	Dokumen Revisi POK III
2	Membantu penyusunan Rencana Penarikan Dana (RPD)	Dokumen RPD
3	Membantu penyusunan dokumen Surat Pertanggung jawaban (SPJ)	Dokumen SPJ
4	Membantu penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	Laporan Bulanan
5	Mengelola Data keuangan menggunakan Microsoft Excel dan Google Sheets	Rekapitulasi Data
6	Mendata kebutuhan operasional kantor	Daftar kebutuhan operasional

3.2 Rincian Kegiatan yang Dilakukan

Kegiatan pertama adalah membantu penyusunan Revisi POK III Tahun Anggaran 2026. Revisi ini diperlukan karena ada perubahan kebutuhan anggaran dan pelaksanaan kegiatan selama tahun anggaran, sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara revisi anggaran yang berlaku (Kementerian Keuangan, 2021). Dari sini, penulis memahami bahwa POK adalah dokumen yang sangat vital menjadi acuan untuk semua kegiatan operasional instansi, sehingga perubahan apapun harus segera disesuaikan dengan dokumen pendukung lainnya.

Berikutnya, penulis ikut menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) berdasarkan hasil revisi anggaran tersebut. Penyusunan ini bertujuan untuk merencanakan kebutuhan dana sesuai dengan pelaksanaan anggaran dan pengelolaan kas pemerintahan (Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2017). Kegiatan ini memberi gambaran tentang betapa pentingnya merencanakan kapan dan berapa banyak dana harus ditarik agar semua kegiatan bisa berjalan tepat waktu tanpa ada kekurangan atau kelebihan anggaran.

Proses penyusunan SPJ adalah yang paling banyak melibatkan detail administrasi. Mulai dari memeriksa kelengkapan nota belanja, mengecek apakah nominalnya sesuai dengan anggaran, menempelkan bukti transaksi, memindai dokumen, sampai menyusun semua berkas sesuai urutan yang benar. Kalau ada kesalahan atau dokumen yang kurang, harus diperbaiki dulu sebelum bisa dinyatakan lengkap.

Selain itu, penulis juga membantu menyusun LRA bulanan yang dibuat berdasarkan data realisasi anggaran yang sudah diverifikasi (Pemerintah Republik Indonesia, 2010). Semua pengolahan datanya menggunakan Microsoft Excel dan Google Sheets. Ada juga kegiatan pendataan kebutuhan operasional kantor seperti air minum, alat kebersihan, dan sebagainya. Meskipun kelihatannya sepele, kegiatan ini ternyata penting untuk memastikan kebutuhan kantor selalu tersedia tepat waktu.

3.3 Apa yang Berbeda antara Teori dan Praktik?

Di perkuliahan, pengelolaan keuangan pemerintah diajarkan sebagai siklus yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Konsep itu memang membantu untuk memahami alurnya secara umum dan sistematis (Undang-Undang Republik Indonesia, 2003). Tapi setelah turun langsung ke lapangan, ternyata setiap tahapan itu jauh lebih ribet dari yang dibayangkan.

Contohnya, sebelum satu dokumen SPJ bisa dianggap selesai, ada banyak langkah yang harus dilalui: cek nota, cocokkan dengan anggaran, tempel bukti, pindai, verifikasi, baru arsipkan. Belum lagi kalau ada revisi di satu dokumen—misalnya POK—maka dokumen-dokumen lain seperti RPD dan LRA juga harus ikut disesuaikan. Jadi, semua dokumen itu saling berkaitan erat dan tidak bisa dikerjakan asal-asalan. Ketelitian benar-benar menjadi kunci di sini.

Tabel 2. Perbandingan Teori dan Praktik Pengelolaan Keuangan

ASPEK	TEORI PERKULIAHAN	PRAKTIK SELAMA KKL
Perencanaan Anggaran	Disusun Berdasarkan Kebutuhan Anggaran	Disesuaikan kembali melalui Revisi POK apabila terjadi perubahan kebutuhan
RPD	Sebagai Rencana Penarikan Dana	Disusun berdasarkan hasil revisi anggaran dan jadwal pelaksanaan kegiatan
SPJ	Dokumen Pertanggungjawaban	Melibatkan pemeriksaan nota, penempelan bukti, scanning, verifikasi, dan revisi dokumen
Laporan	Penyusunan Laporan Realisasi	Disusun berdasarkan hasil verifikasi seluruh dokumen pendukung
Administrasi	Dijelaskan Secara Umum	Melibatkan koordinasi antar pegawai, pengarsipan, dan pengelolaan dokumen secara berkelanjutan

Sumber: Hasil observasi penulis selama KKL

3.4 Manfaat yang Diperoleh

Bagi mahasiswa, KKL ini memberi banyak manfaat nyata. Pertama, pemahaman tentang pengelolaan keuangan pemerintah jadi jauh lebih konkret. Kedua, kemampuan menggunakan Microsoft Excel dan Google Sheets untuk mengolah data keuangan juga meningkat. Ketiga, penulis jadi lebih terlatih dalam hal ketelitian saat bekerja dengan dokumen. Dan yang tidak kalah penting, pengalaman bekerja dalam lingkungan birokrasi pemerintahan memberikan gambaran tentang bagaimana etika dan profesionalisme kerja seharusnya diterapkan. Bagi instansi sendiri, keterlibatan mahasiswa membantu meringankan beban pekerjaan administratif, tentu saja dengan tetap diawasi oleh pegawai yang berwenang.

SIMPULAN

Dari pengalaman KKL di Perwakilan Ombudsman RI Kepulauan Riau, ada beberapa hal penting yang bisa disimpulkan. Pertama, kegiatan pendampingan keuangan memberikan pengalaman nyata tentang bagaimana proses administrasi keuangan pemerintah dijalankan, dari awal hingga akhir. Kedua, ternyata pengelolaan keuangan di lapangan itu tidak sesederhana yang diajarkan di kelas—ada banyak langkah verifikasi, koordinasi, dan pengarsipan yang harus dilakukan dengan cermat.

Ketiga, pengalaman ini memperlihatkan bahwa ada perbedaan nyata antara teori dan praktik: siklus yang tampak berurutan di kelas ternyata jauh lebih saling terkait dan bergantung satu sama lain di dunia nyata. Keempat, KKL berhasil meningkatkan kemampuan teknis dan administratif penulis, termasuk dalam pengolahan data dan penyusunan dokumen resmi. Kelima, secara keseluruhan, KKL terbukti menjadi jembatan yang sangat efektif antara pembelajaran di

kampus dengan dunia kerja, terutama bagi mahasiswa yang ingin berkarier di bidang akuntansi sektor publik.

Berdasarkan pengalaman KKL ini. Untuk Perwakilan Ombudsman RI Kepulauan Riau, sebaiknya terus mempertahankan standar administrasi keuangan yang sudah baik, dan jika memungkinkan, lebih banyak memanfaatkan teknologi digital agar proses verifikasi dan pengarsipan dokumen bisa lebih cepat dan efisien.

Untuk mahasiswa yang akan menjalani KKL, ada baiknya mempersiapkan diri terlebih dahulu dengan mempelajari dasar-dasar pengelolaan keuangan pemerintah dan melatih kemampuan menggunakan Microsoft Excel dan Google Sheets. Bekal itu akan sangat membantu saat harus langsung terjun mengerjakan tugas administratif keuangan.

Untuk pihak kampus, hasil KKL ini semoga bisa dijadikan bahan untuk mengevaluasi dan memperkaya isi perkuliahan, terutama pada mata kuliah akuntansi sektor publik dan keuangan pemerintah, agar materi yang diajarkan semakin sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Dan untuk pelaksanaan KKL ke depannya, mahasiswa sebaiknya diberi kesempatan untuk terlibat dalam lebih banyak tahapan pengelolaan keuangan—dari perencanaan sampai pelaporan akhir—agar pengalaman yang didapat benar-benar komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ema dan Santoso. (2024). Implementation of Good Governance in Public Sector Accounting: Evaluation of Effectiveness in Local Government. *Tamansiswa Accounting Journal International*, 15(1), 143–150.
- Kementerian Keuangan. (2021). *Peraturan Menteri! Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/Pmk.02/2021 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Dengan*. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/pematangsiantar/id/data-publikasi/pengumuman/2900-pmk-nomor-199-tahun-2021-tentang-tata-cara-revisi-anggaran.html>
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 197 /Pmk.05/20 17 Tent Ang Rencana Penarikan Dana, Rencana Penerimaan Dana, Dan Perencanaan Kas*.
- Monika dan Kristanto. (2024). *mplementation of Good Governance in Public Sector Accounting: Evaluation of Effectiveness in Local Government*. 11(01), 57–63.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. 4–7.
- Undang-Undang. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Pasal 1. *Jurnal Media Hukum*, 1964(1), 1–122. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40446/uu-no-1-tahun-2004:text=Undang-Undang Nomor 1 tahun,Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor>
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara*. 147–173.